RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
Jl. Braga No 137 Tlp. 022-4233401 Bandung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadlirat ALLAH S.W.T. bahwa *Rencana Kinerja Tahunan Dinas PSDA Propinsi Jawa Barat Tahun 2016* dapat diselesaikan tepat pada waktunya, yang walaupun dalam proses penyusunannya masih terdapat hal-hal yang belum dianggap sempurna, hal ini tidak menjadikan kami merupakan suatu beban akan tetapi merupakan suatu motivasi bahwa untuk penyusunan di masa yang akan datang harus lebih baik daripada saat ini, sekalipun demikian kami telah berusaha se-optimal mungkin untuk menyajikan dengan sebaik-baiknya.

Dengan memperhatikan sumberdaya air serta keadaan lingkungan yang dihadapi, cara untuk menghadapi tujuan dan sasaran secara konsisten disusun dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang relevan serta merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik.

Sebagaimana dalam Inpress RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan Rencana Pengukuran Pencapaian Kinerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Sistematika laporan ini mengacu pada Buku petunjuk Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dengan Peraturan MENPAN No. 29 Tahun 2010.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini telah berpedoman terhadap RENSTRA Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan sudah mengikuti sasaran yang ingin dicapai pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 serta Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 dan PPAS TA 2016.

Dengan keterbatasan data yang ada, kami menyadari bahwa penyajian ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga kami menganggap perlu adanya masukan-masukan serta saran – saran untuk mencapai kesempurnaan dalam penyusunannya.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini, semoga dapat dipergunakan dan bermanfaat.

Bandung, Desember 2015
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PSDA

Ir. EDDY I.M. NASUTION, DIPL. SE., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600803 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	1
	1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II	**RENCANA STRATEJIK**	6
	2.1. Latar Belakang	6
	2.1.1. Visi, Misi, dan Tujuan	6
	2.1.2. Sasaran, Indikator sasaran dan program	9
	2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016	15
	2.2.1. Sasaran dan Indikator sasaran	15
	2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran	27
BAB III	**PENUTUP**	44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata, pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa :

- Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang ;
- Dalam menghadapi ketidak-seimbangan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras ;
- Pengelolaan Sumber Daya Air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar instansi ;
- Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih merupakan prasayarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam tujuan berbangsa dan bernegara. *Good Governance* merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel maka setiap bagian dalam organisasi pemerintahan harus dapat menyajikan kinerja yang dapat diukur dan dinilai oleh segenap masyarakat.

Dengan memperhatikan sumberdaya air serta keadaan lingkungan yang dihadapi, cara untuk menghadapi tujuan dan sasaran secara konsisten disusun dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang relevan serta merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik.

Sebagaimana dalam Peraturan Menpan No. 29/ 2010 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan Pengukuran Pencapaian Kinerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

1.2. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar Hukum daripada pembuatan laporan ini maka disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

a. Landasan Idiil, yaitu Pancasila

b. Konstitusional, yaitu Undang-undang Dasar 1945.

c. Landasan Operasional, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Kabupaten / Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menpan No.29/2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan oleh masing-masing Instansi. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

1.3. TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DINAS PSDA

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), maka pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No. 55) dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi sbb :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat**

   Subbag Perencanaan dan Program

   Subbag Keuangan

   Subbag Kepegawaian dan Umum
3. **Bidang Rekayasa Teknis**

   Seksi Survey

   Seksi Desain Irigasi

   Seksi Desain Sungai, Danau, Rawa dan Pantai
4. **Bidang Konstruksi**

   Seksi Konstruksi Irigasi

   Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Rawa dan Pantai

   Seksi Tata Teknik
5. **Bidang Operasi dan Pemeliharaan**

   Seksi Operasi

   Seksi Pemeliharaan

   Seksi Bencana Alam Sumber Daya Air
6. **Bidang Bina Manfaat**

   Seksi Saran teknis

   Seksi Pengawasan dan Pengendalian

   Seksi Kerjasama
7. **Kelompok Jabatan Fungsional**

   Adalah staf penunjang Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk melaksanakan tugas – tugas yang bersifat fungsional dengan jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Sedangkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tugas pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sumber Daya Air berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas, maka Dinas mempunyai **fungsi** :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
b. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan teknis Sumber Daya Air yang meliputi, pembinaan perekayasaan, pembinaan konstruksi, pembinaan operasi dan pemeliharaan, serta pembinaan pemanfaatan sumber daya air;
c. Penyelenggaraan fasilitasi dan sistem investasi pengusahaan sumber daya air;
d. Penyelenggaraan saran pertimbangan teknis pemanfaatan air dan sumber air serta pelaksanaan pelayanan umum pengelolaan sumber daya air;
e. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
f. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
g. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan dalam pelaksanaannya Dinas PSDA dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai-balai Pendayagunaan Sumber Daya Air yang tersebar dalam 6 Wilayah Sungai yang ada di Jawa Barat. Adapun struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane
   a. Sub Unit Operasional dan Pemeliharaan Bendung Katulampa Kota Bogor ; dan
   b. Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota Bekasi.
2. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea – Cibareno
   a. Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air Kabupaten Cianjur.
3. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum
   a. Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Bandung;
   b. Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota Cimahi;
   c. Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Indramayu;
   d. Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Karawang;
   e. Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Bekasi;
4. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung
   a. Sub Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Majalengka;

b. Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Kuningan;dan

c. Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Sumedang;

5. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy

   a. Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota Banjar;

6. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki

   a. Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Garut;

   b. Sub Unit Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Ciamis;

7. Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air

   Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masing – masing Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi sbb :

   1. Kepala Balai ;
   2. subbagian Tata Usaha ;
   3. Seksi Irigasi ;
   4. Seksi Sungai, Danau, Rawa dan Pantai ;
   5. Kelompok Jabatan fungsional ; dan
   6. Sub Unit Pelayanan.

   Tugas pokok UPTD di lingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas meliputi pelayanan, pengembangan, pelatihan, konservasi dan pelestarian dibidangnya, sesuai dengan kebijakan gubernur serta fungsi Dinas di bidang sumberdaya air di wilayah kerjanya.

BAB II
RENCANA STRATEJIK

2.1. Rencana Stratejik Tahun 2013 – 2018

Perencanaan Stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat tengah menyusun Rancangan Awal Rencana Stratejik Tahun 2013 - 2018, dimana stratejik pada dasarnya adalah langkah-langkah konseptual dan konprehensif untuk memperlancar dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Visi organisasi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat Eksis, Antisipatif dan Inovatif, oleh karenanya suatu visi organisasi harus dapat menggambarkan keadaan masa depan yang diinginkan. Proses penyusunan Visi, Misi, dan Nilai-nilai dalam penyusunan ini dilakukan secara bersama seluruh anggota organisasi, dengan mengembangkan metoda *Shared Vission.*

Sedangkan Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Visi dan Misi yang tercantum tersebut sudah mengacu pada dokumen renstra yang baru (2013-2018) sebagai pedoman penyusunan dokumen RKT ini.

2.1.1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Visi merupakan gambaran masa depan ideal dan realistik yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah jawaban atas pertanyaan "kita ingin menjadi apa", sehingga visi merupakan pemikiran apa yang menjadi pekerjaan kita dimasa yang akan datang.

Visi adalah pernyataan tentang masa depan yang ditulis atau dibicarakan sekarang. Ini adalah suatu proses bagaimana mengelola realita saat ini dengan merentangkan pandangan ke masa depan.

Visi harus mampu memberikan makna yang dalam dan kuat tentang fokus apa yang akan dikerjakan dalam medan persaingan sebagai upaya memperoleh keunggulan daya hidup organisasi.

Berikut merupakan Visi Dinas pada Renstra terbaru dan Visi Pemerintah Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang akan dijadikan acuan atau dasar pertimbangan dalam menyusun Visi Dinas Tahun 2013-2018.

Visi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 2013-2018
"INFRASTRUKTUR SDA DAN IRIGASI YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN"

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Infrastruktur SDA dan Irigasi: diartikan bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung dimana pengelolaan air bukan berarti hanya irigasi. Infrastruktur sumber daya air terkait dengan cakupan pengelolaan sumberdaya air adalah sarana penyediaan air bersih dan/atau air minum, sanitasi/pengelolaan limbah, pengendalian banjir, irigasi, drainase, serta kegiatan konservasi sumberdaya air itu sendiri.

Andal: diartikan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dengan jumlah aparatur yang memadai memiliki kemampuan yang ada mampu melakukan pengelolaan sumberdaya air di Provinsi Jawa Barat

Berkelanjutan: diartikan pengelolaan sumberdaya air berkesinambungan dari tahun ke tahun mulai dari RPJMD ke RPJP selanjutnya karena air sebagai kebutuhan hidup yang vital dan esential dimana Pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya di tujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Visi Provinsi Jawa Barat 2013-2018
"JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"

Berlandaskan atas Visi Jawa Barat tersebut, dalam menyusun Visinya Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat akan menyeleraraskan Visi di lingkungan Dinas PSDA yang dapat ikut serta menyukseskan Visi Jawa Barat tersebut dan tentu saja berdasarkan pada hasil evaluasi dari Visi Dinas Tahun 2008-2013.

Misi

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan segala sesuatu penjelasan tentang bisnis/produk alat pelayanan yang ditawarkan untuk keperluan masyarakat.

Pernyataan *misi* adalah pernyataan yang tegas tentang maksud tugas suatu organisasi yang membedakan maksud tugas/pekerjaan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Pernyataan misi suatu organisasi mengarahkan/menunjukan tentang rentang ruang lingkup dari cara beroperasi suatu organisasi.

Misi merupakan jawaban atas pertanyaan "apa tugas kita?" atau jawaban atas pernyataan "mengapa organisasi dibentuk/diadakan?" Pernyataan misi menunjukan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi sebagai alasan dasar untuk berdirinya organisasi.

Banyak organisasi gagal karena pernyataan misi yang dirumuskan hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat/pelanggan dan stakeholders. Oleh karenanya pernyataan misi harus jelas menyatakan kepentingan masyarakat/pelanggan dan stakeholders.

Pernyataan misi yang jelas akan memberi arahan jangka panjang sehingga memberikan stabilitas manajemen dan kepemimpinan organisasi. Misi berubah apabila kehendak (*purpose*) organisasi berubah atau karena adanya validasi langkah/komponen manajemen strategik.

Berikut merupakan Misi Dinas pada Renstra Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat TA 2013-2018 dan Misi Pemerintah Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang akan dijadikan acuan atau dasar pertimbangan dalam pelaksanaan tupoksi di Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat.

Rumusan Misi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah :

1. **Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sumber Daya air.**
2. **Merumuskan kebijakan operasional Pengelolaan SDA**
3. **Menyelenggarakan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air Berbasis pelayanan publik.**
4. **Menyelenggarakan Pengelolaan SISDA**
5. **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna SDA**

Rumusan Misi Pemerintah Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah :

1. **Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.**
2. **Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.**
3. **Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik.**

4. **Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.**
5. **Mengkokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.**

Dalam misi Jawa Barat tersebut, Misi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat perlu menyelaraskan terhadap Misi ke dua dan empat. Dengan berpedoman pada kedua Misi tersebut maka diharapkan Dinas PSDA dapat membuat Misi yang dapat menyukseskan Misi Jawa Barat tersebut.

Tujuan

Tujuan merupakan target bersifat kuantitatif atau kualitatif dari suatu organisasi yang pencapaiannya merupakan ukuran keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Tujuan bersifat jangka panjang, serasi dan mengklarifikasi visi, misi, dan nilai-nilai, diharapkan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Adapun tujuan Dinas PSDA yang telah dirumuskan dalam Rencana Stratejik Dinas terdahulu adalah sbb :

1. Memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sumber air dan memperhatikan lingkungan sumber air
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
3. Menjaga kelangsungan kondisi dan fungsi sumber air dan infrastruktur sumber daya air
4. Mewujudkan jaringan irigasi yang mampu mengalirkan debit air sesuai kebutuhan
5. Mewujudkan system pengelolaan data sumber daya air yang menjadi acuan pengelolaan sumber daya air

2.1.2. Sasaran, Indikator Sasaran, dan Proram

Sasaran

Sasaran pada dasarnya adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lebih pendek. Untuk mencapai tujuan di atas, maka disusun sasaran tahunannya secara umum sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi

3. Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsinya infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam

4. Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi

5. Meningkatnya sistem informasi sumber daya air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat

Indikator sasaran

Dalam penyusunan rencana program dilengkapi dengan Indikator Sasaran hasil pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Adapun indikator Sasaran pada Renstra Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat terdahulu (Tahun 2008 – 2013) antara lain :

- Prosentase rekomendasi teknis yang disediakan tepat waktu
- Tingkat kepuasan masyarakat
- Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya air
- Terlaksananya pengelolaan irigasi partisipatif
- Kapasitas tampung situ-situ di Wilayah Sungai kewenangan provinsi
- Prosentase penanganan darurat insfrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana alam
- Prosentase kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi
- Tingkat keakuratan data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air
- Prosentase data sumber daya air yang dilayani

Sedangkan dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 terdapat 5 indikator kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas PSDA sampai dengan akhir Tahun 2018, yaitu :

a. *Sasaran Strategis* : Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air

   Indikator Kinerja : 1. Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu

2. Prosentase intensitas tanam pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam

b. *Sasaran Strategis* : Meningkatnya partisipasi sumber daya manusia dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi

Indikator Kinerja :
1. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air
2. Prosentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat

c. *Sasaran Strategis* : Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsinya infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam

Indikator Kinerja :
1. Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
2. Prosentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi

d. *Sasaran Strategis* : Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi

Indikator Kinerja : 1. Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik

e. *Sasaran Strategis* : Meningkatnya sistem informasi sumber daya air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat

Indikator Kinerja :
1. Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air
2. Prosentase data sumber daya air yang dilayani

Kebijakan dan Program

Kebijakan

Kebijakan Nasional dan kebijakan Pemerintah Jawa Barat menjadi acuan bagi semua organisasi perangkat daerah termasuk Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat.

Kemampuan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan. Pemerintah Pusat memandang, bahwa Kemampuan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air masih belum optimal kualitasnya sehingga sangat mempengaruhi kemampuan pengelolaan air dan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air dikembangkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan reformasi kebijakan sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan agar pengelola, petani pemakai air

dan penerima manfaat air lainnya, mampu efisien serta berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air ke depan harus menempatkan **Capacity Building** dalam tahapan strategis. Capacity Building merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan yang menitik beratkan pada kemampuan pemerintah agar adapat mewujudkan *good governance*, yang bercirikan (memiliki kapasitas menjalankan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah yang lain; (2) akuntabel dan transparan dalam pengambilan keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi;(4) peduli terhadap kemiskinan dan pemerataan; (5) memiliki komitmen terhadap ekonomi yang berorientasi pasar (*edralin,1997*). Komponen-komponen yang harus dikembangkan dalam Capacity Building menurut *Eade* (1997) adalah : (1) Kapasitas Individu Aparat (dimensi manusia); (2) kapasitas kelembagaan (dimensi Teknologi) dan (3) Kapasitas modal yang diwujudkan dalam bentuk sumberdaya, sarana dan prasarana (dimensi fisik). Capacity Buliding di Indonesia didisain untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan;(2) mendorong partisipasi masyarakat; (3) mendorong tumbuh kembangmya sector swasta dan (4) mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar.

Pembaharuan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dilakukan melalui perumusan kebijakan nasional Pengelolaan Sumber Daya air. Pembangunan Sumber Daya Air (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-14/M.EKON/12/2001) terlihat jelas penerapan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembaruan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dengan demikian visinya adalah **"Terwujudnya kemanfaatan sumberdaya air bagi kesejahteraan rakyat".**

Pengembangan struktur perekonomian regional yang tanggguh bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian serta perluasan kesempatan kerja di pedesaan. Hal itu selaras dengan tujuan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi dalam mewujudkan kemamfaatan air dalam bidang pertanian (Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2006)

Ada dua jenis acuan pengelolaan SDA yang memuat visi, misi, tujuan dan prinsip pengelolaan SDA sesuai dengan UU No.7/2004 tentang SDA dan PP 42/2008 tentang PSDA yaitu :

- Kebijakan berbasis wilayah administrasi diantaranya kebijakan Nasional, kebijakan Provinsi, dan kebijakan Kabupaten / Kota.
- Kebijakan berbasis wilayah sungai diantaranya Pola dan Rencana PSDA jangka waktu 20 tahun, Program PSDA jangka waktu 5 tahun dan Kegiatan tahunan PSDA.

Adapun kebijakan yang mengikat terhadap pengelolaan sumber daya air antara lain :

1 Meningkatkan & mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
2 Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayaguna an sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
3 Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mengembangankan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningakatan pelayanan kepada masyarakat.
4 Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
5 Meningkatkan pelayanan OPD kepada masyarakat pengguna dan pemanfaat sumber daya air

Rencana Program

Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Adapun program prioritas secara operasional pengelolaan sumber daya air dalam kurun 5 (lima) tahunan selain tertuang pada Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat, juga berpedoman pada pedoman operasional yang tertuang dalam Kebijakan Regional. Relevan dengan kebijaksanaan diatas, maka pelaksanaan Pengelolaan SDA Jawa Barat tahun 2014 disusun dalam 11 (sebelas) Program sebagai berikut :

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4. Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfataan teknologi informasi
7. Program perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah
8. Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
9. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringn serta Pengamanan Pantai
10. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
11. Program pembinaan jasa konstruksi

Kebijakan dan Program merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana kebijakan dan program di atas saling mengikat dan saling berhubungan, antara lain :

1. *Kebijakan* : Meningkatkan & mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

   Program :

   a. Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
   b. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
   c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
   d. Program pembinaan jasa konstruksi

2. *Kebijakan* : Meningkatkan pelayanan OPD kepada masyarakat pengguna dan pemanfaat sumber daya air.

   Program :

   a. Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
   b. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
   c. Program pelayanan administrasi perkantoran
   d. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
   e. Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
   f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   g. Program perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah

3. *Kebijakan* : Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air

   Program :

   a. Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
   b. Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai

4. *Kebijakan* : Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mengembangkan dan

menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Program :

a. Program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfataan teknologi informasi

5. *Kebijakan* : Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

Program :

a. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016

2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan perencanaan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, oleh karena itulah di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penetapan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan gambaran bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun 2016 ini.

Di dalam rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, adapun sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra yang selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 2016 ini beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Rencana Kinerja Dinas disusun guna menunjang sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Stratejik Pemerintah Jawa Barat, dengan rincian sasaran stratejik, indikator kinerja dan target yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahunan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Instansi : Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang disediakan tepat waktu	100%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara Di Jawa Barat.	Prosentase pelaya-nan pengguna air permukaan, tanah negara, dan sempa-dan sumber air yang diselesaikan dalam waktu 21 hari terhitung berkas diterima dengan lengkap dan benar	%	100	
				2. Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat.	Prosentase gambar teknis yang disetujui untuk rekomendasi teknis pengajuan SIPPA.	%	100	
				3. Manajemen DAS pada 6 Wilayah Sungai	Prosentase dokumen Analisa teknis yang disetujui untuk rekomendasi teknis pengajuan SIPPA	%	100	
				4. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara	Prosentase pemanfaatan ar permukaan dan tanah negara yang diawasi	%	100	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase Intensitas Tanam pada daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	220%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Prosentase luas lahan sawah pada Daerah irigasi kewenangan provinsi yang terairi	%	100	
				2. Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi di Jawa Barat	Prosentase O&P Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah yang dipantau	%	100	
	Tersusunnya dokumen perencanaan dalam 1 tahun	5 Dok	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Sumber Daya Air.	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air	Dok	5	
				2. Verifikasi Bantuan Keuangan Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah Dokumen Verifikasi Bantuan Keuangan	Dok	27	
	Tersusunnya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	6 Dok	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	1. Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan Internal Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas SDA	Dok	6	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersedianya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetapkan / disahkan	60%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat.	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetapkan / disahkan	%	100	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja mendukung tupoksinya, dan terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat serta terlaksananya pembenahan sistem, prosedur, dan standarisasi kualitas pelayanan publik	69%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase kebutuhan adminsitrasi perkantoran yang terpenuhi	%	69	
	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	69%	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana yang telah ditingkatkan	%	69	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional Dinas dan UPTD dan terwujudnya kenyamanan & pelayanan kepada masyarakat	69%	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Aparatur	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dipelihara	%	69	
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya air	4 Tahapan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Jumlah DI yang dipelihara	DI	91	
				2. Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat.	Jumlah Dokumen Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Dok	14	
				3. Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu Lintas Kewenangan Pemerintah	Jumlah dokumen masterplan pengelolaan jaringan irigasi terpadu lintas kewenangan provinsi	Dok	1	
			Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat.	jumlah dokumen Masterplan Penyediaan Air Baku di Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan	Dok	3	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2. Survey Investigasi Rekayasa Teknik SDA	jumlah dokumen hasil survey investigasi rekayasa teknik sumber daya air	Dok	1	
				3. Dewan SDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan Dewan SDA	Dok	1	
				4. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Prov. Jawa Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan WISMP Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Dok	1	
				5. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Jumlah Dokumen Kegiatan WISMP Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Dok	1	
							1	
			Pembinaan Jasa Kontruksi	1. Supervisi Konstruksi Bidang Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Supervisi Konstruksi Sumber Daya Air	Dok	6	
	Prosentase pengelola sumber daya air dan irigasi yang mengikuti Diklat	2%	Pembinaan Jasa Kontruksi	1. Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat	jumlah pegawai yang dibina serta dokumen hasi supervisi pelaksanaan konstruksi sumber daya air dan irigasi	Orang	50	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Peningkatan kapasitas Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa barat	Jumlah pengelola Sumber Daya Air yang dibina dalam bidang Operasi dan pemeliharaan	Orang	50	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	69%	Program Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1. Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase Jumlah SDM yang terpenuhi kesejahteraan dan kemampuan aparatur	%	69	
	Tersusunya dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat	4 Dok	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air	6	Dok	
Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsinya infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya Kapasitas tampung situ-situ di Wilayah Sungai kewenangan provinsi	150.000 m^3	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan Situ-situ pada 2 Wilayah Sungai	Jumlah situ yang direhabilitasi/ ditingkatkan	Situ	8	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase insfrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan Serta Pengamanan Pantai	1. Penanganan darurat Bencana Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	prosentase penanganan darurat infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana	%	100	
				2. Dukungan Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Jumlah Dokumen Potensi Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Dok	1	
				3. Penanganan Banjir Cilencang di Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penanganan Banjir Cilencang	Dok	2	
	Jumlah dan tingkat kinerja sarana dan prasarana pengendali erosi dans edimentasi serta perlindungan sumber air	50 titik	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai pada 4 (empat) Wilayah Sungai	Jumlah Sungai yang direhabilitasi untuk meminimalisir daya rusak air	Sungai	19	
				2. Pembangunan dan pengamanan Mata Air DAS Citarum	jumlah mata air yang berhasil ditata dan diamankan	Mata Air	20	
	Terjaganya sempadan sumber air	2 Lokasi	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau	1. Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat	Jumlah Sempadan Sumber Air yang diukur	Lokasi	2	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dan sumber daya air lainnya	2. Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung, dan DAS Cimanuk	Jumlah Sempadan Sumber Air yang diukur	Lokasi	2	
	Tersedianya dokumen studi dan perencanaan situ, waduk, sungai, dan bangunan penampung air lainnya	4 Dok	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat.	Jumlah dokumen hasil desain rehabilitasi situ, waduk, sungai di Jawa Barat	Dok	6	
	Dukungan terhadap rencana pembangunan waduk strategis	3 Waduk	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Dukungan Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang	Dokumen sharing anggaran pembebasan lahan	Dok	1	
				2. Dukungan Pembangunan Waduk Cileuweung di Kabupaten Kuningan	Dokumen sharing anggaran pembebasan lahan	Dok	1	
				3. Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna di kab. Subang	Jumlah Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	Dok	1	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4. Dukungan Pembangunan Waduk Leuwikeris di Kab. Ciamis	Jumlah Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	Dok	1	
				5. CLTH PPK AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh	Jumlah Dokumen AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh	Dok	1	
	Teroptimalkannya pemanfataan situ-situ di Jawa Barat melalui : - OP - Rehab	40 Situ 7 Situ	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan Situ-situ pada 6 Wilayah Sungai	Jumlah Situ yang ditangani : OP Rehab	Situ Situ	50 16	
Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72,05%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pengelolaan jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	%	72.05	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dukungan terhadap rencana pembangunan irigasi baru	2 DI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang di Kabupaten Sumedang	Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	Dok	1	
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Caringin	79,40%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Pembebasan Lahan dan Pembangunan DI. Caringin di Kab. Sukabumi	Pembangunan DI. Caringin	%	50	
Meningkatnya sistem informasi sumber daya air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	62%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaaatan Teknologi Informasi	1. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat	Tingkat keakuratan data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	%	62	
			Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat	Akurasi Data Hidrologi di Jawa Barat	%	62	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase data sumber daya air yang dilayani	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaaatan Teknologi Informasi	1. Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat	prosentase data Sumber Daya Air yang dilayani	%	100	
				2. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase pembangunan bidang SDA yang diketahui masyarakat	%	100	

2.2.2. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran

Rencana Program dan kegiatan merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Adapun program prioritas secara operasional pengelolaan sumber daya air dalam kurun 5 (lima) tahunan selain tertuang pada Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat, juga berpedoman pada pedoman operasional yang tertuang dalam Kebijakan Regional.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Provinsi Jawa Barat, besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. **340.115.860.287,00** dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Perubahan) (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	**1. BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**45.955.396.559,00**
	- BELANJA PEGAWAI	45.955.396.559,00
II.	**2. BELANJA LANGSUNG**	**294.160.463.728,00**
	- BELANJA PEGAWAI	18.996.298.100,00
	- BELANJA BARANG DAN JASA	101.070.643.528,00
	- BELANJA MODAL	174.093.522.100,00
	JUMLAH BELANJA	**340.115.860.287,00**

ALOKASI ANGGARAN PER UNIT KEGIATAN PADA TAHUN 2016

NO.	UNIT KERJA / KEGIATAN	ANGGARAN BIAYA (Perubahan) (Rp)
	DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT	**340.115.860.287,00**
I.	**SEKRETARIAT**	**68.540.659.317,00**
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45.955.396.559,00
2.	PERENCANAAN UMUM SUMBER DAYA AIR BIDANG SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA	1.900.000.000,00
3.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT	1.332.905.848,00
4.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT	4.533.657.760,00
5.	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN INTERNAL DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT	150.000.000,00
6.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT	4.362.566.700,00
7.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT	9.931.972.450,00
8.	PENYUSUNAN DOKUMEN SINERGITAS PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	374.160.000,00
II.	**BIDANG REKAYASA TEKNIK**	**5.757.252.320,00**
1.	PERENCANAAN DETAIL REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI JAWA BARAT	2.390.788.840,00
2.	PERENCANAAN DETAIL SITU, WADUK DAN SUNGAI DI JAWA BARAT	1.846.297.480,00
3.	SURVEY INVESTIGASI REKAYASA TEKNIK SDA	452.094.000,00
4.	CLTH PPK AMDAL PEMBANGUNAN BENDUNGAN CILETUH	420.861.000,00
5.	PENANGANAN BANJIR CILEUNCANG DI KOTA BANDUNG, KOTA DEPOK DAN KOTA BEKASI	647.211.000,00
III.	**BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN**	**10.163.316.920,00**
1.	PEMANTAUAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI O&P JARINGAN IRIGASI DI JAWA BARAT	405.141.240,00
2.	DUKUNGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG	800.000.000,00
3.	PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DAN KEKERINGAN	1.906.519.440,00
4.	DUKUNGAN PENGENDALIAN BANJIR DAN KEKERINGAN DI 6 WILAYAH SUNGAI	142.500.000,00
5.	PENINGKATAN KAPASITAS KEGIATAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA BARAT	759.465.040,00
6.	DUKUNGAN PEMBANGUNAN WADUK CILEUWEUNG DI KABUPATEN KUNINGAN	5.888.191.200,00

NO.	UNIT KERJA / KEGIATAN	ANGGARAN BIAYA (Perubahan) (Rp)
7.	PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI TERPADU LINTAS KEWENANGAN PEMERINTAH	142.500.000,00
8.	DUKUNGAN PEMBANGUNAN BENDUNG RENGRANG DI KABUPATEN SUEDANG	45.000.000,00
9.	DUKUNGAN PEMBANGUNAN WADUK LEUWIKERIS DI KAB CIAMIS	34.500.000,00
10.	DUKUNGAN PEMBANGUNAN WADUK SADAWARNA DI KAB SUBANG	39.500.000,00
IV.	**BIDANG BINA MANFAAT**	**1.857.500.000,00**
1.	PENGUKURAN DAN PENETAPAN SEMPADAN SUNGAI CITARUM	285.000.000,00
2.	PENINGKATAN PENERTIBAN SARAN TEKNIK AIR PERMUKAAN DAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA DI JAWA BARAT	292.494.240,00
3.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	275.152.760,00
4.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DAN TANAH NEGARA	387.353.000,00
5.	DEWAN SDA PROVINSI JAWA BARAT	142.500.000,00
6.	PENGELOLAAN TERINTEGRASI DAS CITARUM, DAS CILIWUNG DAN DAS CIMANUK	475.000.000,00
V.	**BIDANG KONSTRUKSI**	**32.578.451.290,00**
1.	PEMBINAAN PELAKSANAANDAN MONITORING KEGIATAN KONSTRUKSI DI JAWA BARAT	287.500.000,00
2.	WISMP - 2 DAN PENDAMPING HIBAH APBD DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT	3.376.314.000,00
3.	PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN DI CARINGIN DI KAB. SUKABUMI	23.301.300.000,00
4.	DUKUNGAN DAK REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	2.490.221.000,00
5.	SUPERVISI KONSTRUKSI BIDANG SUMBER DAYA AIR	2.933.116.290,00
6.	VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT	190.000.000,00
VI.	**BALAI PSDA WS. CILIWUNG-CISADANE**	**25.012.515.980,00**
1.	PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CILIWUNG- CISADANE	7.312.518.000,00
2.	PENGELOLAAN SITU-SITU WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE	5.000.000.000,00
3.	MANAJEMEN DAS BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE	734.258.480,00
4.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BALAI PSDA WS. CILIWUNG-CISADANE	381.112.500,00
5.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPSDA WS. CILIWUNG-CISADANE	707.049.500,00
6.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CILIWUNG-CISADANE	3.314.264.000,00

NO.	UNIT KERJA / KEGIATAN	ANGGARAN BIAYA (Perubahan) (Rp)
7.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CILIWUNG-CISADANE	593.192.500,00
8.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE (DAK)	6.970.121.000,00
VII.	**BALAI PSDA WS. CISADEA-CIBARENO**	**25.227.166.680,00**
1.	PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO	9.126.700.560,00
2.	PENGELOLAAN SITU-SITU WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO	2.230.803.140,00
3.	MANAJEMEN DAS BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO	1.153.282.480,00
4.	PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN SUNGAI CISADEA-CIBARENO	1.938.590.000,00
5.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BALAI PSDA WS. CISADEA-CIBARENO	114.000.000,00
6.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPSDA WS. CISADEA-CIBARENO	689.250.000,00
7.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CISADEA-CIBARENO	452.000.000,00
8.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CISADEA-CIBARENO	399.000.000,00
9.	WISMP – 2 DAN PENDAMPING HIBAH APBD BALAI PSDA WSCISADEA-CIBARENO	4.268.682.000,00
10.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO (DAK)	4.854.858.500,00
VIII.	**BALAI PSDA WS. CITARUM**	**71.430.111.410,00**
1.	PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CITARUM	33.363.578.500,00
2.	PENGELOLAAN SITU-SITU WILAYAH SUNGAI CITARUM	17.167.796.560,00
3.	MANAJEMEN DAS BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI CITARUM	896.217.480,00
4.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BALAI PSDA WS. CITARUM	216.238.900,00
5.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPSDA WS. CITARUM	1.123.418.720,00
6.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CITARUM	7.320.974.000,00
7.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CITARUM	398.560.000,00
8.	PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN SUNGAI BALAI PSDA WS. CITARUM	1.500.000.000,00
9.	PEMBANGUNAN DAN PENGAMANAN MATA AIR DI DAS CITARUM	2.452.369.500,00
10.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CITARUM (DAK)	6.990.957.750,00
IX.	**BALAI PSDA WS. CIMANUK-CISANGGARUNG**	**38.981.968.200,00**
1.	PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	21.103.365.880,00

NO.	UNIT KERJA / KEGIATAN	ANGGARAN BIAYA (Perubahan) (Rp)
2.	PENGELOLAAN SITU-SITU WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	2.988.864.840,00
3.	MANAJEMEN DAS BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	972.341.480,00
4.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BALAI PSDA WS. CIMANUK-CISANGGARUNG	137.267.500,00
5.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPSDA WS. CIMANUK-CISANGGARUNG	922.082.500,00
6.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CIMANUK-CISANGGARUNG	1.148.844.000,00
7.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CIMANUK-CISANGGARUNG	1.039.732.000,00
8.	PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	773.174.500,00
9.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG (DAK)	9.896.295.500,00
X.	**BALAI PSDA WS. CITANDUY**	**23.184.520.160,00**
1.	PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CITANDUY	10.894.498.480,00
2.	PENGELOLAAN SITU-SITU WILAYAH SUNGAI CITANDUY	1.820.724.320,00
3.	MANAJEMEN DAS BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI CITANDUY	931.429.680,00
4.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BALAI PSDA WS. CITANDUY	88.550.000,00
5.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPSDA WS. CITANDUY	684.362.880,00
6.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CITANDUY	905.644.000,00
7.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS.CITANDUY	568.745.000,00
8.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CITANDUY (DAK)	7.290.565.800,00
XI.	**BALAI PSDA WS. CIWULAN-CILAKI**	**33.820.162.650,00**
1.	PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI	11.015.505.470,00
2.	PENGELOLAAN SITU-SITU WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI	14.292.477.720,00
3.	MANAJEMEN DAS BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI	1.015.858.960,00
4.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BALAI PSDA WS. CIWULAN-CILAKI	79.110.000,00
5.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPSDA WS. CIWULAN-CILAKI	458.075.000,00
6.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CIWULAN-CILAKI	472.385.000,00
7.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PSDA WS. CIWULAN-CILAKI	373.701.500,00
8.	PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN SUNGAI WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI	2.212.060.000,00
9.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI (DAK)	3.900.989.000,00

NO.	UNIT KERJA / KEGIATAN	ANGGARAN BIAYA (Perubahan) (Rp)
XII.	**BALAI DATA DAN INFORMASI**	**3.562.235.360,00**
1.	PENGELOLAAN SISTEM DATA BASE DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR DI JAWA BARAT	403.788.440,00
2.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMAPUAN APARATUR KANTOR BALAI DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR	99.978.500,00
3.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR	279.887.480,00
4.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR	453.519.500,00
5.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA BALAI DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR	122.255.000,00
6.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR DI JAWA BARAT	256.270.000,00
7.	PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA HIDROLOGI JAWA BARAT	482.494.240,00
8.	SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1.464.042.200,00

Sedangkan anggaran sesuai yang menunjang sasaran strategis Dinas PSDA Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Penganggaran Rencana Kinerja Tahunan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Instansi : Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air	Prosentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang disediakan tepat waktu	100%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	4. Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara Di Jawa Barat.	Prosentase pelaya-nan pengguna air permukaan, tanah negara, dan sempa-dan sumber air yang diselesaikan dalam waktu 21 hari terhitung berkas diterima dengan lengkap dan benar	%	100	292.494.240	
				5. Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat.	Prosentase gambar teknis yang disetujui untuk rekomendasi teknis pengajuan SIPPA.	%	100	-	
				6. Manajemen DAS pada 6 Wilayah Sungai	Prosentase dokumen Analisa teknis yang disetujui untuk rekomendasi teknis pengajuan SIPPA	%	100	5.703.388.560	
				4. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara	Prosentase pemanfaatan ar permukaan dan tanah negara yang diawasi	%	100	387.353.000	

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Prosentase Intensitas Tanam pada daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terairi dalam 3 musim tanam	220%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	3. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Prosentase luas lahan sawah pada Daerah irigasi kewenangan provinsi yang terairi	%	100	-	
				4. Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi di Jawa Barat	Prosentase O&P Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah yang dipantau	%	100	405.141.240	
	Tersusunnya dokumen perencanaan dalam 1 tahun	5 Dok	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah	3. Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Sumber Daya Air.	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air	Dok	5	374.160.000	
				4. Verifikasi Bantuan Keuangan Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah Dokumen Verifikasi Bantuan Keuangan	Dok	27	190.000.000	
	Tersusunnya dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	6 Dok	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	2. Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan Internal Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas SDA	Dok	6	150.000.000	

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Tersedianya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetapkan / disahkan	60%	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	2. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat.	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai yang telah tersusun dan kemudian ditetapkan / disahkan	%	100	-	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja mendukung tupoksinya, dan terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat serta terlaksananya pembenahan sistem, prosedur, dan standarisasi kualitas pelayanan publik	69%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase kebutuhan adminsitrasi perkantoran yang terpenuhi	%	69	9.397.783.840	
	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	69%	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana yang telah ditingkatkan	%	69	23.999.602.950	

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional Dinas dan UPTD dan terwujudnya kenyamanan & pelayanan kepada masyarakat	69%	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Aparatur	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dipelihara	%	69	7.857.752.700	
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya air	4 Tahapan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	4. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Jumlah DI yang dipelihara	DI	91	-	
				5. Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat.	Jumlah Dokumen Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Dok	14	2.390.788.840	
				6. Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu Lintas Kewenangan Pemerintah	Jumlah dokumen masterplan pengelolaan jaringan irigasi terpadu lintas kewenangan provinsi	Dok	1	142.500.000	

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	6. Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat.	jumlah dokumen Masterplan Penyediaan Air Baku di Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan	Dok	3	1.900.000.000	
				7. Survey Investigasi Rekayasa Teknik SDA	jumlah dokumen hasil survey investigasi rekayasa teknik sumber daya air	Dok	1	452.094.000	
				8. Dewan SDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan Dewan SDA	Dok	1	142.500.000	
				9. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Prov. Jawa Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan WISMP Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat	Dok	1	3.376.314.000	
				10. WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Jumlah Dokumen Kegiatan WISMP Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Dok	1	4.268.682.000	
							1		
			Pembinaan Jasa Kontruksi	2. Supervisi Konstruksi Bidang Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Supervisi Konstruksi Sumber Daya Air	Dok	6	2.933.116.290	

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Prosentase pengelola sumber daya air dan irigasi yang mengikuti Diklat	2%	Pembinaan Jasa Kontruksi	2. Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat	jumlah pegawai yang dibina serta dokumen hasi supervisi pelaksanaan konstruksi sumber daya air dan irigasi	Orang	50	287.500.000	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	2. Peningkatan kapasitas Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa barat	Jumlah pengelola Sumber Daya Air yang dibina dalam bidang Operasi dan pemeliharaan	Orang	50	759.465.040	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	69%	Program Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	2. Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur Dinas, 6 Balai PSDA Wilayah Sungai, dan Balai Pusat Data dan Informasi SDA	Prosentase Jumlah SDM yang terpenuhi kesejahteraan dan kemampuan aparatur	%	69	2.449.163.248	
	Tersusunya dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat	4 Dok	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	2. Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air	6	Dok	275.152.760	

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Meningkatnya kapasitas tampung sumber air dan berfungsinya infrastruktur sumber daya air yang terkena bencana alam	Bertambahnya Kapasitas tampung situ-situ di Wilayah Sungai kewenangan provinsi	150.000 m^3	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	2. Pengelolaan Situ-situ pada 2 Wilayah Sungai	Jumlah situ yang direhabilitasi/ ditingkatkan	Situ	8	16.523.280.860	
	Prosentase insfrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	100%	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan Serta Pengamanan Pantai	4. Penanganan darurat Bencana Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	prosentase penanganan darurat infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terkena bencana	%	100	1.906.519.440	
				5. Dukungan Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Jumlah Dokumen Potensi Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai	Dok	1	142.500.000	
				6. Penanganan Banjir Cilencang di Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penanganan Banjir Cilencang	Dok	2	647.211.000	
	Jumlah dan tingkat kinerja sarana dan prasarana pengendali erosi dans edimentasi serta perlindungan sumber air	50 titik	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	3. Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai pada 4 (empat) Wilayah Sungai	Jumlah Sungai yang direhabilitasi untuk meminimalisir daya rusak air	Sungai	19	6.423.824.500	
				4. Pembangunan dan pengamanan	jumlah mata air yang berhasil ditata dan diamankan	Mata Air	20	2.452.369.500	

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
				Mata Air DAS Citarum					
	Terjaganya sempadan sumber air	2 Lokasi	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	3. Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat	Jumlah Sempadan Sumber Air yang diukur	Lokasi	2	285.000.000	
				4. Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung, dan DAS Cimanuk	Jumlah Sempadan Sumber Air yang diukur	Lokasi	2	475.000.000	
	Tersedianya dokumen studi dan perencanaan situ, waduk, sungai, dan bangunan penampung air lainnya	4 Dok	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	2. Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat.	Jumlah dokumen hasil desain rehabilitasi situ, waduk, sungai di Jawa Barat	Dok	6	1.846.297.480	
	Dukungan terhadap rencana pembangunan waduk strategis	3 Waduk	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	6. Dukungan Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang	Dokumen sharing anggaran pembebasan lahan	Dok	1	800.000.000	
				7. Dukungan Pembangunan Waduk Cileuweung di Kabupaten Kuningan	Dokumen sharing anggaran pembebasan lahan	Dok	1	5.888.191.200	

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
				8. Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna di kab. Subang	Jumlah Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	Dok	1	39.500.000	
				9. Dukungan Pembangunan Waduk Leuwikeris di Kab. Ciamis	Jumlah Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	Dok	1	34.500.000	
				10. CLTH PPK AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh	Jumlah Dokumen AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh	Dok	1	420.861.000	
	Teroptimalkannya pemanfataan situ-situ di Jawa Barat melalui : - OP - Rehab	40 Situ 7 Situ	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	2. Pengelolaan Situ-situ pada 6 Wilayah Sungai	Jumlah Situ yang ditangani : OP Rehab	Situ Situ	50 16	26.977.385.720	
Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72,05%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	2. Pengelolaan jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	%	72.05	135.210.175.440	

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Dukungan terhadap rencana pembangunan irigasi baru	2 DI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	2. Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang di Kabupaten Sumedang	Dokumen Sharing Anggaran Pembebasan Lahan	Dok	1	45.000.000	
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Caringin	79,40%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	2. Pembebasan Lahan dan Pembangunan DI. Caringin di Kab. Sukabumi	Pembangunan DI. Caringin	%	50	23.301.300.000	
Meningkatnya sistem informasi sumber daya air yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	62%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaaatan Teknologi Informasi	2. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat	Tingkat keakuratan data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	%	62	256.270.000	
			Program Pengembangan, pengelolaan dan	1. Pengelolaan dan Analisis Data	Akurasi Data Hidrologi di Jawa Barat	%	62	482.494.240	

Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Hidrologi Jawa Barat					
	Prosentase data sumber daya air yang dilayani	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaaatan Teknologi Informasi	3. Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat	prosentase data Sumber Daya Air yang dilayani	%	100	403.788.440	
				4. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase pembangunan bidang SDA yang diketahui masyarakat	%	100	1.464.042.200	

BAB III
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 di fokuskan pada aspek pembangunan infrastruktur wilayah Provinsi Jawa Barat dan mengarah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan kerjasama antar pemerintah dengan swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur. Selain di atas pengeloaan di bidang sumber daya air diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, berkurangnya bencana banjir dan kekeringan, serta meningkatnya layanan jaringan irigasi.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, terdiri dari 11 Program, 96 Kegiatan dengan alokasi anggaran Biaya Langsung sebesar **294.160.463.728,00**,-

Target yang diharapkan oleh Dinas PSDA sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD tahun 2013-2018 dengan anggaran di atas diupayakan jaringan irigasi kondisi baik sebesar 72%-77% dan mempertahankan Intensitas Tanam diatas 200% dari 91 Daerah Irigasi yang di OP dan 55 Daerah Irigasi yang direhabilitasi.

Program di atas dapat tercapai apabila hal- hal sebagai berikut :

1. Alokasi APBD tidak mengalami perubahan sesuai dengan PPAS untuk program dan kegiatan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, khususnya pada Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringin Pengairan Lainnya dimana terdapat Dana Anggaran Khusus yang bersumber dari APBN
2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam budaya hemat air, sehingga penggunaan air lebih efisien dan efektip
3. Tidak terjadi bencana alam yang mengibatkan kerusakan infrastruksur sumber daya air yang berimplikasi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.
4. Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak mengalami degradasi yang signifikan

Demikan Rencana Kinerja Tahunan Dinas PSDA Tahun 2016 kami sampaikan, mohon maaf apabila data yang kami sampaikan kurang memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi pengelolaan sumber daya air yang sebenarnya di masyarakat, Untuk itu maka saran-saran dan masukan dari setiap kalangan yang merasa peduli terhadap pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat, sangat diharapkan sekali.